



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Juli 2020

Halaman: 5

Pengaturan Pesepeda Dimulai Dari Kota

Dishub DIY Akan Paparkan Draft ke Sultan

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan DIY akan melakukan pemaparan di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebelum memutuskan kebijakan baru bagi pesepeda. Selain itu, Dishub setempat juga akan fokus melakukan penataan pesepeda di area perkotaan.

"Dari draf yang ada, kami nulis surat permohonan paparan ke Gubernur dan Wali Kota. Dari hasil pemaparan tersebut bagaimana, kami tidak lanjut," ucap Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto, Selasa (30/6). Ia menjelaskan, untuk saat

ini, kebutuhan yang mendasar terkait aturan bagi pesepeda difokuskan di perkotaan. Ia menangkap terkait fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana ribuan pesepeda menjajal pusat kota dengan aktivitas olahraga tersebut.

"Artinya bukan berarti lainnya tidak penting, tapi yang mendasar saat ini yang di koreksi," ungkapnya. Dalam menyusun draf tersebut, Tavip mengemukakan bahwa melihat referensi dari berbagai negara sebut saja Singapura, Inggris, Australia, dan sebagainya. "Di DKI Jakarta mereka memperlebar

trotoar mempersempit jalan. Itu secara aturan benar agar masyarakat naik transportasi massal, jalan kaki, dan bersepeda. Kalau kita (DIY) melakukan itu, bisa diprotes. Artinya ada plus minus. Itu yang saya butuh komitmen dengan pimpinan," ungkapnya.

Ia mengatakan, sebenarnya ada efek berlipat dari aktivitas bersepeda. Mulai dari mengurangi emisi gas buang di jalan, menjadikan badan sehat, dan juga menghidupkan warung-warung kecil yang menjadi jujugan para pesepeda.

"Euforia, ketidak tertuban, perlunya jalur khusus, itu yang perlu diatur. Tugas kami membuat tertib di jalan. Ini yang sedang didiskusikan," bebernya.

Hati-hati

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan euforia bersepeda tidak hanya melanda Yogyakarta bahkan seluruh dunia. "Sekarang karena jumlahnya (pesepeda) banyak, dan belum tentu ahli betul masih belajar, tentu kehati-hatian perlu dilakukan. Bersepeda untuk rekreasi dan olahraga, bukan bekerja, sehingga ambilah jalur-jalur yang memang tidak

berbahaya," ungkap Aji.

Ia menambahkan, sesuai pandemi, jadikan bersepeda menjadi gaya hidup selain memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun. "Sekolah, bekerja, melakukan aktivitas pakai sepeda. Teman-teman Dishub sedang membuat desain kira-kira jalur sepeda bisa diamankan. Artinya, kami nanti akan melihat potensi pesepeda seperti

apa," ucapnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyebut regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. "Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda," tutur Juru Bicara Kemhub Adita Irawati seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menetapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda ini di wilayahnya masing-masing," ucapnya. (kunjape)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☒ Negatif	☒ Amat Segera	
2.	☐ Positif	☐ Segera	
3.	☐ Netral	☐ Biasa	
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005